

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini telah menempatkan telepon seluler (ponsel) sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern. Pada Juni 2017, terdapat fakta bahwa 5 miliar orang di seluruh penjuru dunia menggunakan telepon genggam.¹ Lebih lagi terdapat fakta bahwa seseorang dapat memiliki lebih dari satu ponsel. Berdasarkan data e-marketer, dilaporkan bahwa pengguna aktif ponsel pintar di Indonesia mencapai 100 juta pada tahun 2018. Dari hasil data tersebut menunjukkan jika Indonesia berada di posisi keempat dengan pengguna ponsel pintar terbanyak di dunia. Pada tahun 2013, jumlah impor ponsel yang masuk di Indonesia juga tinggi yakni mencapai 62 juta unit dengan nilai sebesar US\$ 3 miliar.² Jika dibandingkan dengan angka ekspor barang yang sama, angka tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan ponsel buatan luar negeri.

Akibat adanya ketimpangan pada industri ponsel yang lebih didominasi oleh ponsel impor daripada ponsel produksi dalam negeri, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah ponsel impor dan meningkatkan produktivitas

¹5 Billion People Now Have a Mobile Phone Connection, According to GSMA Data, <https://venturebeat.com/2017/06/13/5-billion-people-now-have-a-mobile-phone-connection-according-to-gsma-data/> (20/10/2018, 15:37 WIB)

²Kemenperin, *Impor Ponsel Turun Drastis, Produksi Nasional Tembus 60 Juta Unit*, dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18827/Impor-Ponsel-Turun-Drastis,-Produksi-Nasional-Tembus-60-Juta-Unit>, (28/02/2019 12.09 WIB)

dalam negeri yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang bernama kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).³ Definisi TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri, pada produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet.⁴ Tujuan dikeluarkannya kebijakan TKDN yakni untuk memajukan produksi komponen lokal industri telepon seluler dalam negeri, meningkatkan kualitas sektor TIK dan memberikan keuntungan pada kepentingan nasional seperti meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, baik *hardware* maupun *software*.⁵

Perhitungan TKDN yakni, aspek pengembangan produk (*software*, desain produk) sebesar 20% dan aspek manufaktur (*hardware*, adaptor, *casing*, *headset*, dan aksesoris pendukung ponsel lainnya) sebesar 80%. Sehingga pada tahun 2014, terjadi penurunan angka impor ponsel pintar menjadi 60 juta buah, sedangkan ponsel lokal meningkat hingga 5,7 juta buah. Lalu, di tahun 2015, terjadi penurunan lagi pada ponsel impor menjadi 37 juta buah dengan nilai mencapai US\$ 2,3 miliar.⁶ Bahkan ponsel dalam negeri meningkat secara signifikan hingga 700% untuk brand dalam negeri dan luar negeri.⁷ Pemerintah Indonesia melalui Kemenperin berupaya untuk mengurangi jumlah ponsel impor yang masuk ke Indonesia dengan terus meningkatkan kualitas sektor telekomunikasi dan

³Kemenperin, *Desain Masuk Komponen TKDN*, dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10089/Desain-Masuk-Komponen-TKDN>, (28/02/2019 13/32 WIB)

⁴Kemenperin, *Peremenperin No. 29 Tahun 2017*, dalam http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2316 (12/02/2019 17.00 WIB).

⁵*Ibid.*

⁶Definisi ponsel lokal yang dimaksud adalah ponsel produksi atau buatan perusahaan asal Indonesia.

⁷ *Ibid.*

informasi.⁸ Dengan adanya persaingan pasar yang sehat, kondusif serta perbaikan kualitas komponen lokal, akan membuat produksi ponsel lokal meningkat.

Aturan TKDN telah berlaku sejak 2016 dengan kesepakatan awal kandungan lokal sebesar 20%, lalu dinaikkan menjadi 30% berlaku mulai Januari tahun 2017.⁹ Nilai 30% ini tidak hanya berlaku untuk komponen perangkat keras ponsel, tapi juga bisa dalam bentuk lain seperti investasi pabrik di Indonesia. Perakitan perangkat keras seperti box, buku panduan dan aksesoris ponsel juga dihitung sebagai konten lokal. Dengan adanya TKDN ini, pemerintah secara tidak langsung mendorong produsen luar negeri untuk membangun pabriknya di Indonesia ataupun bekerja sama dengan produsen dalam negeri. Data Kemenperin mengungkapkan jika ada 24 pabrik perakitan komponen ponsel lokal di Indonesia. Jika ada produsen yang belum memenuhi TKDN 30% untuk ponsel 4G, maka produknya tidak bisa dijual secara legal di Indonesia. Mulai diberlakukannya kebijakan TKDN tersebut penulis menduga pemerintah melakukan upaya proteksionisme untuk melindungi industri elektronik domestik serta dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan transfer teknologi di Indonesia.

Alasan penulis memilih topik TKDN ponsel karena di era modern seperti sekarang ini ponsel adalah salah satu barang yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Masyarakat

⁸Agus Tri Haryanto, *Berkah TKDN, Ponsel Made In Indonesia Tembus 60,5 Juta Unit*, dalam <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3876005/berkah-tkdn-ponsel-made-in-indonesia-tembus-605-juta-unit>, (11 Desember 2018, 10.09 WIB)

⁹Kominfo, *Ini 2 Skema TKDN Ponsel 4G* dalam https://kominfo.go.id/content/detail/7675/ini-2-skema-tkdn-ponsel-4g/0/sorotan_media (12/13/2018 13.09 WIB)

Indonesia menjadi semakin melek teknologi, namun kebanyakan ponsel yang digunakan adalah ponsel produksi luar negeri atau ponsel impor. Ponsel impor tersebut tidak diproduksi di dalam negeri, jadi pemerintah tidak mendapatkan banyak keuntungan selain dari bea cukai. Pada tahun 2013, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang salah satu penyebabnya yaitu semakin tingginya angka impor ponsel yang mencapai Rp. 29 Triliun atau senilai dengan 31% dari total defisit neraca perdagangan Indonesia yang mencapai USD 8 miliar.¹⁰ Defisit neraca perdagangan tersebut membuat kemampuan bersaing Indonesia pada pasar internasional diragukan. Hal itu karena neraca transaksi perdagangan nasional yang defisit terhitung cukup parah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan hanya lebih baik daripada Filipina.¹¹ Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia merasa perlu melakukan tindakan proteksi untuk membatasi masuknya ponsel impor dan mendorong pertumbuhan produksi ponsel lokal dengan mengeluarkan kebijakan TKDN. Atas dasar itu, dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul ***“Proteksionisme Pemerintah Indonesia Melalui Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Telepon Seluler”***.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁰Arif Piyoto, *Impor Ponsel Rp 29 T Picu Defisit Perdagangan*, dalam <https://www.merdeka.com/teknologi/impor-ponsel-rp-29-t-picu-defisit-perdagangan.html>, (28/02/2019 12.09 WIB)

¹¹Kemenperin, *Produsen HP Wajib Gunakan Komponen Lokal 40%*, dalam <http://kemenperin.go.id/artikel/11208/Produsen-HP-Wajib-Gunakan-Komponen-Lokal-40>, (12/12/2018 13.09 WIB)

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada peneliti akan mengajukan rumusan masalah yakni:

Bagaimana Kepentingan Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Melakukan Proteksi Terhadap Industri Telepon Seluler Melalui Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan politik ekonomi Indonesia pada industri ponsel dalam negeri dalam penerbitan kebijakan proteksionisme melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih terhadap kajian teoritis khususnya teori Proteksionisme maupun wawasan mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumbangan ilmu khususnya Jurusan Hubungan Internasional dan referensi bagi peneliti selanjutnya

dan dapat membantu peneliti lain dalam penyajian informasi untuk melakukan penelitian yang serupa.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan TKDN dan penggunaan teori proteksionisme. **Penelitian Pertama**, jurnal oleh Gunawarman Hartono dan Edi Santoso yang berjudul “*Analisis Penetapan Strategi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Manufaktur di Indonesia: Studi Pada Komponen Kopling*”.¹² Penulis menjelaskan bahwa TKDN pada suatu produk dinilai menggunakan tiga hal yakni: bahan, tenaga kerja, dan pengeluaran yang tidak terduga. Bahan tersebut dinilai berdasarkan negara asal bahan tersebut diproduksi, tenaga kerja dinilai berdasarkan kewarganegaraannya. Biaya yang tidak terduga biasanya berasal dari mesin yang digunakan di pabrik, dan hal lainnya yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa. TKDN dihitung pada semua jenis barang produksi berdasarkan proses produksi dan material yang sama. Penelitian ini penting karena sama-sama membahas mengenai TKDN namun berbeda dalam penggunaan teori dan jenis barang produksi yang akan diteliti.

¹²Gunawarman Hartono dan Edi Santoso, *Analisis Penetapan Strategi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Manufaktur di Indonesia: Studi Pada Komponen Kopling*, Jurnal, Vol. 14. No. 1 (April 2013), dalam <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=165104> (13/12/2018 10.20 WIB)

Penelitian kedua, skripsi oleh Yeni Farida yaitu penelitian yang berjudul Strategi “Pemasaran Produk Telepon Seluler Cina dalam menguasai Pasar Telepon Seluler di Indonesia”.¹³Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Menurut Yeni, salah satu alasan mengapa pasar ponsel Indonesia dipenuhi produk dari China karena ponsel China merupakan ponsel yang perkebangannya terbilang cepat dari sisi model, fitur maupun tingkat kecanggihannya. Selain itu, untuk sebagai strategi marketingnya, produsen China bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut menjadi daya tarik produsen China untuk mengekspor produknya ke Indonesia ditambah adanya pajak masuk barang ke Indonesia yang kecil. Ponsel impor dari China yang harganya murah namun sudah dibekali dengan fitur yang lengkap membuat banyak orang lebih tertarik daripada membeli produk ponsel lokal. Penelitian ini penting untuk menjadi sumber pemasaran ponsel produk Cina di pasar Indonesia yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga, jurnal oleh Esty Hayu Dewanti yang berjudul “*Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi*”.¹⁴Penelitian Esty menjelaskan bahwa, kebijakan persyaratan kandungan lokal mengharuskan sebuah perusahaan asing untuk menggunakan bahan atau komponen lokal untuk dapat memasarkan produknya. Selain itu, perusahaan asing juga perlu melakukan transfer

¹³Yeni Farida, 2011, *Strategi Pemasaran Produk Telepon Seluler Cina dalam menguasai Pasar Telepon Seluler di Indonesia*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁴Esty Hayu Dewanti, *Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum, Vol. 23, No. 3 (September-Desember 2012), dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/300/165> (13/12/2018 10.24 WIB)

teknologi pada industri lokal untuk dapat menjaga kualitas produknya. Kebijakan persyaratan kandungan lokal populer dilakukan oleh negara berkembang untuk menarik penanaman investasi asing ke dalam negeri. Contohnya seperti Indonesia yang sebagai negara berkembang menerapkan kebijakan TKDN. Di era globalisasi yang hampir tidak ada pembatas, kebijakan hukum investasi dalam negeri harus dapat melindungi kepentingan nasional. Kebijakan seperti itu sangat penting dalam upaya pengembangan industri dan dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen produk elektronik. Kebijakan tentang persyaratan konten lokal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 16/M-Ind/Per/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Kebijakan tersebut juga terdapat pada MoU Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: 522/M-Ind/12/2005 tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan-peraturan tersebut merupakan alat hukum yang dapat melindungi produk nasional Indonesia terhadap gempuran produk impor.

Penelitian keempat, Tesis oleh Muhammad Hanif yang berjudul *“Proteksionisme di Tengah Liberalisasi Perdagangan Dunia”*.¹⁵ Penulis menjelaskan bahwa di era liberalisasi perdagangan seperti sekarang, proteksionisme masih mejadi pilihan kebijakan perdagangan yang beberapa negara di dunia. Adanya liberalisasi perdagangan global seejak akhir WWII melalui GATT

¹⁵Muhammad Hanif, 2014, *Proteksionisme di Tengah Liberalisasi Perdagangan Dunia*, Tesis, Depok: FISIP, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-5/20392936-TA-Muhammad%20Hanif.pdf> (13/12/2018 10.26 WIB)

membuat proteksionisme perdagangan berupa tarif telah turun. Namun, penggunaan proteksionisme kembali meningkat pada tahun 1970an yang mana hampir semua negara menerapkan proteksionisme berupa hambatan non tarif, mulai dari negara berkembang hingga negara maju. Hingga muncul istilah ‘Proteksionisme Baru’ yang tidak transparan, dan lebih beragam. Sejak saat itu, proteksionisme menjadi masalah utama dalam liberalisasi perdagangan internasional. Proteksionisme menjadi masalah karena banyak negara yang berusaha untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Keinginan untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan tidak ada campur tangan pemerintah sepertinya belum bisa terealisasi dengan baik. Karena pada kenyataannya, tidak ada satupun negara yang bisa lepas dari proteksionisme. Penelitian di atas sangat penting sebagai referensi penggunaan teori proteksionisme yang penulis akan kaji namun objek yang diteliti berbeda.

Penelitian kelima, skripsi dari Harnold yang berjudul “*Alasan Proteksionisme Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market*”.¹⁶ Harnold melihat industri penerbangan Indonesia tidak siap dalam menghadapi ASAM tidak seperti negara ASEAN lain. Hal tersebut menjadi alasan Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi ASAM. Contohnya seperti lemahnya konektivitas Garuda Indonesia pada rute-rute intra ASEAN. Untuk tujuan internasional, Garuda Indonesia hanya memiliki tiga rute penerbangan intra

¹⁶Harnold, 2018, *Alasan Proteksionisme Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Single Aviation Market*, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

ASEAN dengan tujuan Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Kalah saing dengan Thai Airways dan Malaysia Airlines yang memiliki sembilan penerbangan di negara ASEAN. *Kedua, forced capital investment*, Harnold melihat Pemerintah Indonesia berinvestasi untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas landasan pacu dan bandara di Indonesia untuk menghadapi ASAM. Pemerintah Indonesia melakukan investasi modal pada pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendukung seperti terminal bandara dan landasan pacu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas bandara baik melalui angkasa Pura 1 ataupun angkasa Pura 2. Lalu, yang ketiga *national interest* dilihat dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga industri penerbangannya saat menghadapi ASAM. Pemerintah Indonesia menggunakan kekuasaan negara untuk memperlambat dan menghalangi proses liberalisasi penerbangan ASEAN, serta menetapkan kuota dan memberikan larangan bagi maskapai asing yang ingin membuka rute baru ke Indonesia dengan berbagai alasan tertentu. Indonesia juga berupaya untuk memperlambat proses liberalisasi dengan menunda ratifikasi dari perjanjian-perjanjian di dalam ASAM sebagai langkah mempersiapkan penerbangan nasional dan untuk menjaga maskapai nasional dari kerugian yang akan didapatkan akibat adanya pasar bebas penerbangan ASEAN. Penelitian ini mempunyai kesamaan teori yang dipakai namun berbeda objek kajiannya yakni Harnold membahas proteksionisme pada industri jasa sedangkan penulis membahas mengenai proteksionisme pemerintah Indonesia pada TKDN industri produk seluler.

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Konsep	Hasil
1.	Jurnal/Gunawarman Hartono dan Edi Santoso/ <i>Analisis Penetapan Strategi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Manufaktur di Indonesia: Studi Pada Komponen Kopling</i>	-Deskriptif analitik -Perhitungan TKDN	-Indonesia perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri terutama pada industri perakitan (manufaktur) -Pemerintah Indonesia perlu mendukung produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk impor.
2.	Skripsi/ <i>Strategi Pemasaran Produk Telepon Seluler Cina dalam Menguasai Pasar Telepon Seluler di Indonesia</i> /Yeni Farida	-Deskriptif Analitik -Perdagangan Bebas (<i>free trade</i>)	-Strategi marketing ponsel Cina di Indonesia yakni dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mendukung adanya produsen ponsel yang berinvestasi di Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengurangi ekspor produk.
3.	Jurnal/Esty Hayu Dewanti/ <i>Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi</i>	-Deskriptif Analitik - <i>local content requirements, national protection</i>	-Kebijakan yang mensyaratkan adanya produk lokal di dalamnya populer diterapkan oleh negara berkembang dan sangat erat kaitannya dengan investasi asing. -Kebijakan konten lokal tersebut harus dibarengi dengan adanya kebijakan hukum investasi agar kepentingan nasional tetap terlindungi.
4.	Tesis/Muhammad Hanif/ <i>Proteksionisme di Tengah Liberalisasi Perdagangan Dunia</i> <i>Proteksionisme di Tengah</i>	-Deskriptif analisis -proteksionisme Philip I Levy, kebijakan	-Kebijakan proteksionisme menghambat terciptanya perdagangan dunia yang

	<i>Liberalisasi Perdagangan Dunia</i>	perdagangan, liberalisasi perdagangan	bebas dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. -Tidak ada negara yang bisa lepas dari proteksionisme.
5.	<i>Skripsi/Harnold/ Alasan Proteksionisme Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market</i>	-Eksplanatif - Teori Proteksionisme Friedrich List	-Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai peraturan peningkatan standar pelayanan, pembangunan serta revitalisasi fasilitas serta kapasitas bandara sebagai langkah mempersiapkan penerbangan nasional dan untuk menjaga maskapai nasional dari kerugian yang akan didapatkan akibat adanya pasar bebas penerbangan ASEAN.
6.	<i>Skripsi/Niko Wahyudin/Proteksionisme Pemerintah Indonesia Melalui Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Pada Industri Telepon Seluler</i>	-Deskriptif Kualitatif -Teori Proteksionisme	-Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan TKDN sebesar 30% pada industri manufaktur ponsel sebagai bentuk proteksi terhadap produk lokal untuk bisa bersaing dengan gempuran produk impor di pasar bebas.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Proteksionis Friedrich List

Proteksionisme dalam kamus ekonomi diartikan dalam dua hal, yakni yang pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah.¹⁷ Kedua, proteksionisme adalah bentuk upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang dibuat yang mana hal ini sebagai bentuk upaya

¹⁷Sumadji *et al*, 2006,*Kamus Ekonomi*, Jakarta: Wacana Intelektual hal. 532

pengendalian impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industri asing.¹⁸Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk upaya untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian yang sebagiannya di luar lindungan dari sistem yang ada di Indonesia.

Friedrich List adalah salah satu penggagas teori proteksionis. Menurut Friedrich List, untuk melindungi produktivitas nasional, negara perlu ikut campur dalam bidang perekonomian dengan mengembangkan industrinya. Proteksionis merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi ekonomi dalam negerinya dengan melakukan proteksi pada produk dalam negeri ataupun pada sektor industri. Tindakan proteksi perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam menjaga kondisi perekonomian domestik negaranya. Friedrich List pada teori proteksionisnya mengemukakan tiga konsep utama yakni, *infant industry*, *forced capital investment*, dan *national interest*.¹⁹ *Infant industry* atau industri baru adalah negara yang tingkat industrinya masih terbilang baru atau masih berkembang. Negara akan tidak diuntungkan jika harus bersaing dengan negara yang industrinya sudah lebih maju. Industri tersebut belum cukup mempunyai kapabilitas ataupun stabilitas yang baik sehingga kualitas manufakturnya pun juga belum sebaik negara maju.²⁰ Industri di

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Gagasan Utama Teori Proteksionisme dalam <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan-utama-teori-proteksionisme.html> (15/12/2018 14.07 WIB)

²⁰Maya Meralda Kartika, *Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008*, Vol. 2, No. 3 (2013), dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi58826697c92full.pdf> (12/14/2018 21.08 WIB)

negara maju jauh lebih baik karena sudah adanya fasilitas penelitian dan modal yang tersedia, tidak seperti industri baru (*infant industry*) di negara-negara berkembang. Friedrich List menyatakan bahwa jika negara tidak dapat mengontrol persaingan industri domestiknya, maka akan sulit untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat maupun negara.²¹

Industri dalam negeri yang baru berkembang perlu mendapat perlindungan terhadap persaingan internasional sampai mereka matang dan stabil seperti dengan melakukan pembatasan pada masuknya produk impor dari negara-negara industri yang telah maju. Pada kasus ini, Pemerintah Indonesia melakukan proteksi terhadap industri ponsel lokal karena jika tidak ada upaya perlindungan, industri ponsel dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk impor yang dinilai lebih baik kualitasnya.

Konsep yang kedua, *forced capital investment* atau jika diartikan secara harfiah adalah investasi yang dipaksakan. Konsep ini melihat perlunya negara untuk melindungi industri dalam negeri dengan melakukan investasi pada bidang industri manufaktur sebanyak dan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan menambah daya saing. Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi yang sangat besar kepada perusahaan ponsel luar negeri untuk memperkuat struktur manufakturnya di Indonesia. Selain mewujudkan transfer teknologi, investasi tersebut juga dapat meningkatkan kualitas SDM lokal untuk

²¹ Friedrich List, 1966, *The National System of Political Economy*, New York: Kelley, dalam <http://livros01.livrosgratis.com.br/mc000167.pdf> (12/15/2018 15.12 WIB)

lebih inovatif dan terampil melalui berbagai pelatihan. Contoh perusahaan ponsel asing yang telah berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik manufaktur adalah Samsung, OPPO, Lenovo, dan lain-lain. Peraturan dalam kebijakan TKDN yang mengharuskan adanya komponen dalam negeri pada produk ponsel yang dipasarkan di Indonesia sebanyak 30% membuat investasi pada industri manufaktur ponsel dalam negeri meningkat. Jadi, secara tidak langsung para produsen ponsel terpaksa harus memenuhi persyaratan TKDN jika ingin memasarkan produknya di Indonesia.

Konsep yang ketiga, *national interest* atau kepentingan nasional. Untuk mencapai kepentingan nasional pada perdagangan internasional, suatu negara perlu menggunakan kekuatan politiknya. Salah satu kepentingan nasional negara yang sangat penting adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pada dasarnya, pemerintah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur hubungan ekonomi rakyatnya dengan siapapun di negara manapun. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, pemerintah Indonesia perlu untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangannya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan TKDN untuk mengurangi tingkat kerugian dari defisitnya pendapatan Negara yang salah satu penyebabnya yakni perdagangan bebas dan impor ponsel yang sangat besar. Dengan adanya TKDN ini, tingkat impor ponsel akan berkurang dan akan memberikan keuntungan kepada negara dari adanya investasi yang ditanamkan di Indonesia.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta, keadaan dan gejala yang ada pada masalah kepentingan politik Indonesia menerbitkan kebijakan TKDN sebagai usaha pemerintah melakukan proteksi terhadap industri ponsel dalam negeri. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dan mengolahnya untuk dianalisa untuk mendapatkan hasil dan menjawab rumusan masalah penelitian ini. Data-data mengenai proteksionisme pemerintah melalui kebijakan TKDN akan dianalisa menggunakan kerangka teori proteksionisme yang dipilih untuk menunjukkan sebenarnya apa yang menjadi alasan di balik diterapkannya kebijakan tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi untuk mengumpulkan berbagai sumber-sumber pendukung untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang didapat melalui riset terdahulu, buku, majalah, koran, skripsi, jurnal, berita,

internet, undang-undang atau peraturan, dan bentuk tulisan lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian serta bersumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasar sumber-sumber yang didapat peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan dipilih agar sesuai dengan sistematika penulisan dan relevan dengan penelitian yang ada.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan penelitian, dimana diharapkan dengan adanya batasan materi penelitian ini tidak keluar dari fokus tujuan penelitian. Batasan materi dalam penelitian ini yakni berfokus pada kebijakan TKDN dan kepentingan politik ekonomi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut sebagai tindakan proteksionis terhadap industri ponsel dalam negeri Indonesia.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Adapun batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni mulai pada tahun 2016 di mana TKDN mulai diterapkan dan dibatasi hingga tahun 2018. Alasan penulis yakni di latarbelakangi dari perkembangan kebijakan TKDN yang naik dari 20% menjadi sebesar 30% per 1 Januari 2017 dan mulai berlakunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet. Serta pada rentang

tahun tersebut tersedia data yang jelas mengenai angka impor ponsel dan produksi ponsel lokal Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Kepentingan politik ekonomi Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan TKDN merupakan tindakan proteksionis yang di latarbelakangi oleh: Pertama, *infant industry*. Pada kasus ini, Pemerintah Indonesia melakukan tindakan proteksi terhadap industri ponsel lokal karena industri lokal aka kalah bersaing dengan ponsel impor dari China ataupun Korea Selatan yang lebih canggih dan murah seperti Oppo, Samsung, Xiaomi yang mendominasi pasar ponsel Indonesia. Maka dari itu, sesuai peraturan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 65 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tabletserta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term (LTE), ponsel tersebut harus dirakit di Indonesia dengan menggunakan beberapa komponen perangkat keras ataupun lunak lokal.

Kedua, *forced capital investment*. Pemerintah Indonesia menawarkan kesempatan investasi yang sangat besar kepada produsen ponsel asing untuk bisa membangun pabrik perakitan ponselnya di Indonesia. Selain menciptakan transfer teknologi bagi Indonesia, masuknya investasi seperti itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dalam negeri yang berkompeten dan terampil untuk dapat bekerja secara unggul di bidangnya melalui pengadaan berbagai program

pelatihan. Contoh beberapa produsen ponsel asing yang telah berinvestasi dengan mendirikan pabrik perakitan ponsel di Indonesia adalah Samsung, OPPO, dan lain-lain. Kebijakan TKDN meningkatkan angka investasi di Indonesia karena mensyaratkan produk ponsel yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi kandungan lokal sebanyak 30%.

Ketiga, *national interest* atau kepentingan nasional, untuk dapat mencapai *national interest* dan mendapat keuntungan pada perdagangan internasional, negara menggunakan kekuatan politiknya. Menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimal adalah salah satu kepentingan nasional suatu negara yang harus dicapai. Pada era liberalisasi perdagangan seperti sekarang, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus mencari keuntungan dari kegiatan perdagangannya. Pemerintah Indonesia menjadikan kebijakan TKDN sebagai strategi proteksi industri ponsel nasional agar: (1) menguatkan daya saing perusahaan-perusahaan ponsel nasional dari dominasi penjualan ponsel impor, (2) meningkatkan pendapatan Negara melalui adanya investasi yang ditanamkan di Indonesia, (3) menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, (4) menciptakan lingkungan bisnis ponsel yang menawarkan pilihan-pilihan ponsel dengan daya beli yang lebih terjangkau dibandingkan ponsel impor.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL BAB	ISI
BAB I	PENDAHULUAN	Latar Belakang Rumusan Masalah

		3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 4 Penelitian Terdahulu 5 Kerangka Teori 1.5.1 Teori Proteksionis Friedrich List 6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Tipe penelitian 1.6.2 Jenis Penelitian 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1 Batasan Materi 1.6.4.2 Batasan Waktu Argumen Sementara Sistematika Penulisan
BAB II	Perkembangan Industri Telepon Seluler di Indonesia dan Munculnya Kebijakan TKDN	2.1 Perkembangan Industri dan Pengguna Ponsel di Indonesia 2.2 Kebijakan TKDN di Indonesia 2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan TKDN di Indonesia 2.4 Regulasi Pengawasan Pelaksanaan TKDN 2.5 Tata Cara Permohonan Penghitungan Nilai TKDN
BAB III	Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Pada Produk Ponsel di Indonesia	3.1 Ketentuan dan Aspek Penilaian TKDN 3.1.1 Penghitungan Nilai TKDN dengan Skema Berbasis Aplikasi 3.1.1.1 Komponen Penghitungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 3.1.1.2 Komponen Penghitungan Tenaga Kerja 3.1.1.3 Komponen Penghitungan Sertifikat Kompetensi 3.1.1.4 Komponen Penghitungan Alat Kerja 3.1.1.5 Ketentuan Kepemilikan Aplikasi 3.1.2 Penghitungan Nilai TKDN dengan Skema Berbasis Pengembangan Inovasi

		3.1.2.1 Tata Cara Penghitungan TKDN Berbasis Pengembangan Inovasi
BAB IV	Kepentingan Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Menerapkan Proteksionisme dengan Mengeluarkan Kebijakan TKDN	4.1 <i>Infant Industry</i> 4.2 <i>Forced Capital Investment</i> 4.3 <i>National Interest</i> 4.3.1 Mengurangi Produk Impor dan Mendorong Produktivitas Industri Ponsel Dalam Negeri 4.3.2 Perusahaan Telepon Seluler Di Indonesia Sebagai Sumber Investasi, Lapangan Pekerjaan dan Transfer Teknologi 4.3.3 Mendukung Pengembang Perangkat Lunak (<i>Software</i>) Ponsel Dalam Negeri Melalui TKDN
BAB V	PENUTUP	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran
Daftar Pustaka		